KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DJPb
Indonesian Treasury

KAJIAN FISKAL REGIONAL
Triwulan I Tahun 2020

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang diberikan sehingga Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat dapat menyusun dan menyelesaikan Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan I Tahun 2020. KFR merupakan *output* pelaksanaan tugas Kanwil DJPb yang memiliki fungsi pembinaan, koordinasi, supervisi, dan representasi Kementerian Keuangan di daerah selaku pengelola fiskal sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organasisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJPb.

KFR ini disusun berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Kajian Fiskal Regional. Penyusunan KFR ini telah melalui proses pengumpulan data dan informasi dari berbagai pihak sehingga substansi KFR diharapkan telah memuat informasi kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Barat yang komprehensif dan berguna kepada *stakeholders* regional Provinsi Kalimantan Barat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung penyusunan KFR ini, terutama berkaitan dengan penyediaan data yang dipertukan. Kami menyadari bahwa dalam KFR ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kami mohon kritik dan saran yang dapat digunakan untuk proses perbaikan dalam penyusunan KFR di masa yang akan datang.

Pontianak, 14 Mei 2020
Kepala Kantor Kepala Kantor Wilayah
DJPb Provinsi Kalimantan Barat,

TTD

Edih Mulyadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GRAFIK ..... **v**

BAB I
SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH **1**
A. Produk Domestik Bruto 1
B. Inflasi 1
C. Indikator Kesejahteraan 2
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) . 3
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3
3. Tingkat Kemiskinan 4

BAB II
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN **6**
A. Pendapatan Negara 6
1. Penerimaan Perpajakan 6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9
B. Belanja Negara 10
1. Belanja Pemerintah Pusat 10
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 10
3. Pengelolaan BLU 10
4. Manajemen Investasi Pusat 12
C. Prognosis Realisasi APBN 12

BAB III
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD **14**
A. Pendapatan Daerah 14
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 15
2. Pendapatan Transfer 16
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 17
B. Belanja Daerah 17
1. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal 17
2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan 18
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020 18

BAB IV
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) **19**
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 19
B. Pendapatan Konsolidasian 19
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan 19
2. Analisis Perubahan 20
3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian 20
C. Belanja Konsolidasian 21
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan 21
2. Analisis Perubahan 21
3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional 22
4. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 22

BAB V
BERITA/ISU FISKAL REGIONAL **23**

Tim Penyusun

Penanggung Jawab: Edih Mulyadi (Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat) ■
Ketua Tim: Darta (Kepala Bidang PPA II) ■ **Kontributor:** Hendrawan Karmonoharjo, Bayu Budi Santosa, Heri Mulyono, Libra Andy C. Simamora, Hasnadya Fitri N ■
Desain Grafis: Hasnadya Fitri N

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalbar s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2020	6
Tabel II.2	Perkembangan Realisasi Belanja Satker BLU periode sd Triwulan I 2019 dan Triwulan I 2020.....	11
Tabel II.3	Ringkasan Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman BUMD dan Pemda Tahun 2020.....	12
Tabel II.5	Penyaluran KUR Wilayah Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2020	12
Tabel II.6	Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalbar s.d. Triwulan I Tahun 2020.....	13
Tabel III.1	Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalbar akhir Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	14
Tabel III.2	Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Barat Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020	18
Tabel IV.1	Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2019/2020	19
Tabel IV.2	Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2019/2020.....	21
Tabel IV.3	Komposisi Belanja Negara Konsolidasian dan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kalbar Triwulan I Tahun 2019/2020	22
Tabel IV.4	Kontribusi Belanja dan Investasi Pemerintah Dalam Pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2020.....	22
Tabel V.1	Penyaluran Dana Desa per Bulan Tahun 2019 dan 2020.....	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalbar s.d Triwulan I Tahun 2019 dan 2020	1
Grafik 1.2	Pergerakan Tingkat Inflasi Prov. Kalbar dan Nasional s.d Triwulan I Tahun 2020	2
Grafik I.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2015 s.d. 2019	3
Grafik I.4	Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar	4
Grafik I.5	Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalbar	5
Grafik I.6	Indeks Kedalaman dan Keparahan Provinsi Kalbar	5
Grafik II.1	Realisasi Penerimaan PPh s.d Triwulan I 2020 Provinsi Kalimantan Barat (miliar rupiah)	7
Grafik II.2	Realisasi Penerimaan PPn s.d Triwulan I 2020 Provinsi Kalbar (miliar rupiah)	7
Grafik II.3	Realisasi Penerimaan PPnBM s.d Triwulan I 2020 Provinsi Kalbar (miliar rupiah)	7
Grafik II.4	Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai s.d Triwulan I 2020.	8
Grafik II.5	Realisasi Penerimaan PNBP Lainnya s.d Triwulan I 2020	9
Grafik II.6	Realisasi Penerimaan PNBP BLU s.d Triwulan I 2020	9
Grafik II.7	Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi Kalbar Triwulan I 2020	10
Grafik II.8	Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Lingkup Provinsi Kalbar Triwulan I 2020	10
Grafik III.1	Realisasi PAD Triwulan I Tahun 2019 dan 2020	15
Grafik III.2	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2019 dan 2020	15
Grafik III.3	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kota Lingkup Provinsi Kalbar Triwulan I Tahun 2019 dan 2020	16
Grafik III.4	Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Triwulan I Tahun 2019 dan 2020	16
Grafik III.5	Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan I Tahun 2019 dan 2020	16
Grafik III.6	Realisasi LLPD Yang Sah pada Triwulan I Tahun 2019 dan 2020	17

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.7 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2020..... 18

Grafik III.8 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Lima rusan Tertinggi) Lingkup Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan I Tahun 2020..... 18

Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasi Triwulan I Tahun 2020..... 19

Grafik IV.2 Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Penerimaan Konsolidasian Triwulan I Tahun 2019/2020 20

Grafik IV.3 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Kalbar Triwulan I Tahun 2019 20

Grafik IV.4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemda terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Kalbar Triwulan I Tahun 2019/2020..... 21

Grafik IV.5 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Kalbar Triwulan I Tahun 2019/2020..... 23

Pulau Pelapis, Kayong Utara

BAB I
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

BAB I
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan I tahun 2020 mencapai sebesar 2,49 persen, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 yaitu 5,07 persen (yoy) dan masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 2,97 persen. PDRB Kalimantan Barat berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 (ADHK) sebesar Rp34,62 triliun, sedangkan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai sebesar Rp54,87 triliun.

Grafik I.1
Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat s.d Triwulan I Tahun 2019 dan 2020

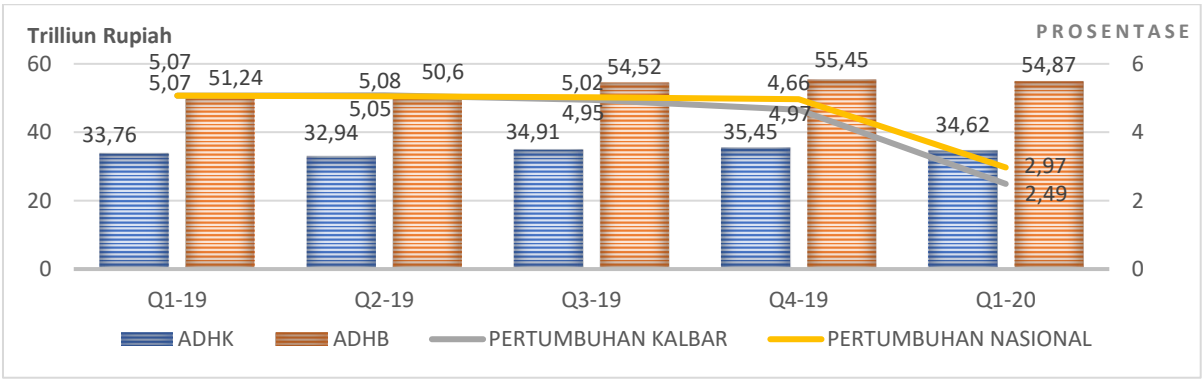

Sumber data: BPS Kalimantan Barat

Pertumbuhan PDRB (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 2,34 persen, dari sisi produksi Lapangan usaha yang mengalami kontraksi terbesar adalah Konstruksi dengan penurunan sebesar 15,89 persen. Sementara dari sisi Pengeluaran kontraksi terbesar dialami oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang turun sebesar 26,39.

Pertumbuhan perekonomian Kalbar pada Triwulan I 2020 sebesar 2,49 persen dengan pertumbuhan tertinggi (y-on-y) dicapai Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,83 persen diikuti Informasi dan Komunikasi 8,87 persen serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,72 persen, sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 0,80 persen. Hal ini disebabkan adanya permintaan dunia terhadap produk tambang meningkat, adanya penambahan 5 unit Compact Mobile BTS (COMBAT) dan 7 Unit Mini BTS dengan jaringan 4 G dan maraknya penggunaan system pembayaran berbasis digital melalui aplikasi pembayaran non tunai baru di Kalbar, meningkatnya komunikasi serta penggunaan data internet menjelang perayaan Imlek, Cap Go Meh dan sembayang kubur. selanjutnya Pertanian tumbuh melambat karena seperti tahun sebelumnya, pada triwulan I merupakan masa panen raya, tetapi pada tahun ini petumbuhan pertanian tidak sebesar tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat fenomena pandemi Covid-19 yang membuat permintaan di Sektor pertanian turun. Disisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa; sebesar 25,06 persen hal ini disebabkan adanya permintaan negara tujuan ekspor komoditas utama Kalbar yang menguat seiring harga komoditas ekspor yang membaik. Total *volume* ekspor meningkat sebesar 27,50 persen sedangkan *nilai* ekspor meningkat sebesar 8,82 persen.

B. Inflasi

Triwulan I tahun 2020 Kalimantan Barat mengalami inflasi 1,31 persen lebih tinggi sebesar 0,55 persen dari inflasi Nasional yaitu 0,76 persen, dan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan inflasi periode yang sama tahun 2019 yang tercatat sebesar 0,89 persen.

Perkembangan inflasi Kalimantan Barat triwulan I 2020 cenderung menurun yaitu pada bulan Januari 2020 sebesar -0,76 persen, terus mengalami penurunan pada bulan Pebruari 2020 sebesar 0,68 persen, dan puncaknya terjadi deflasi pada bulan Maret sebesar -0,14 persen sedangkan Inflasi Nasional triwulan I 2020 mengalami penurunan juga pada bulan Maret 2020 yaitu 0,1 persen.

Grafik I.2
Pergerakan Tingkat Inflasi Prov. Kalimantan Barat dan Nasional s.d Triwulan I Tahun 2020

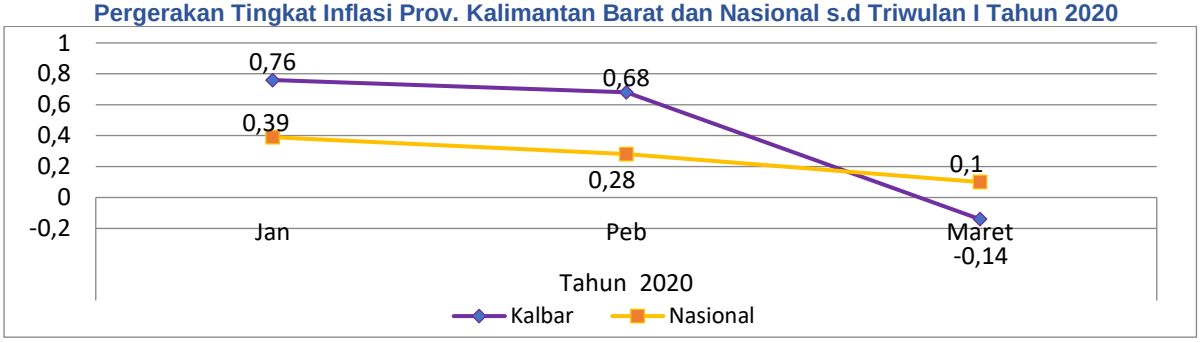

Sumber data: BPS kalimantan Barat (diolah)

Target inflasi Kalbar tahun 2020 seperti yang tertuang di dalam RPJMD adalah kisaran 3,52 persen. Triwulan I 2020 terjadi inflasi sebesar 1,31 persen lebih tinggi dibandingkan inflasi periode yang sama tahun 2019 yang tercatat sebesar 0,89 persen. Inflasi triwulan ini terjadi disebabkan tarif angkutan udara menjadi komoditas yang paling tinggi penurunan harganya. ada lima kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, di mana kelompok transportasi tercatat penurunan yang paling tinggi yakni, sebesar 0,46 persen. Penurunan ini diperkirakan karena sepinya penerbangan setelah tersengat sentimen negatif wabah Covid-19, adanya sejumlah negara yang malakukan karantina wilayah atau lockdown dan penutupan beberapa rute airlines seperti Wings Air yang menutup rute Kuching-Pontianak serta melakukan *cancel* perjalanan dari dan ke Kalbar. Wabah Covid-19 ini memberikan dampak negatif yang luar biasa terhadap jasa penjualan tiket dan perjalanan wisata. Hal ini imbas dari keengganan masyarakat bepergian, baik ke luar negeri maupun dalam negeri.

C. Indikator Kesejahteraan

Sebagai salah satu tolok ukur kinerja kebijakan fiskal di wilayah Propinsi Kalimantan Barat akan tercermin dari keberhasilan dalam mencapai sasaran indikator makro pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA APBD) Tahun 2020. Secara umum terdapat beberapa indikator kesejahteraan yang digunakan sebagai tolok ukur atau target dalam mengukur tingkat keberhasilan kesejahteraan di Wilayah Kalimantan Barat, diantaranya yaitu Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,35 persen, Indek Pembangunan Manuasia (IPM) sebesar 67,87, Tingkat Pengangguran (TPT) sebesar 3,63 dan Tingkat Kemiskinan sebesar 6,43 persen. Perkembangan dan capaian pada periode triwulan I 2020 menunjukan bahwa Tingkat Pertumbuhan Ekonomi telah mencapai sebesar 2,49 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2019 menunjukkan angka 67,65 dan Angka Kemiskinan Tahun 2019 mencapai

7,28 persen, sementara itu untuk Angka Penggangguran (TPT) berdasarkan periode bulan Februari 2020 adalah sebesar 4,56 persen.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat termasuk kategori "sedang" terjadi peningkatan dari 66,98 tahun 2018 menjadi sebesar 67,65 pada tahun 2019 (berdasarkan *release* BPS periode Mei 2019). Walaupun terjadi kenaikan namun capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan triwulan I tahun 2020 belum memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 67,87. Dalam kurun waktu 2015-2019 angka IPM Kalimantan Barat mengalami tren perbaikan dan pada tahun 2019 berada pada urutan 30 dari 34 provinsi. Dilihat dari angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kalimantan Barat sudah mengalami pertumbuhan yang positif sekitar 7,31 tahun.

Grafik I.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2015 s.d. 2019

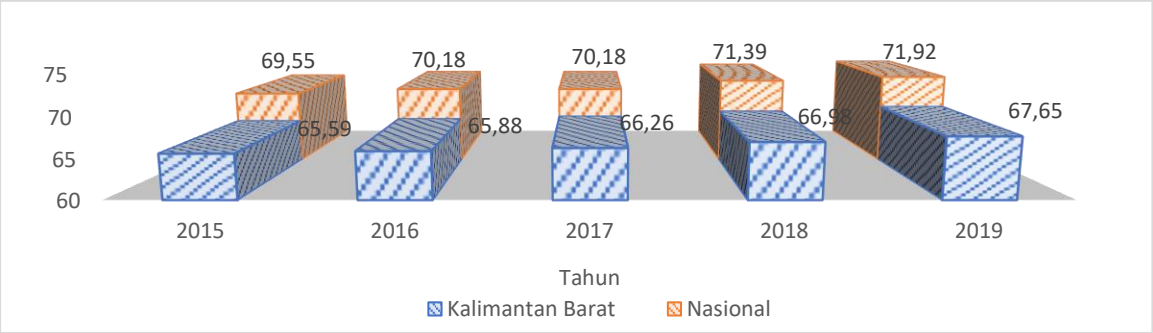

Sumber: BPS kalimantan Barat (diolah)

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2018 sampai dengan 2019, dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat seluruhnya mengalami peningkatan, terdapat 2 (dua) kota berstatus "tinggi" yaitu kota Pontianak dan kota Singkawang, sedangkan 12 kabupaten lainnya berstatus "sedang", terdapat tiga kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Kayong Utara 1,36%, Kabupaten Ketapang 1,13%, dan Kabupaten Bengkayang 1,08%. Kemajuan pembangunan manusia di 3 (tiga) kabupaten tersebut didorong oleh dimensi pendidikan. Kota Pontianak merupakan wilayah dengan IPM tertinggi yaitu 79,35 poin hal ini wajar sebagai Ibu Kota Provinsi, sementara itu yang terendah adalah Kabupaten Kayong Utara 62,66 poin walaupun kemajuan pembangunan manusianya paling cepat di wilayah Kalimantan Barat.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sasaran pembangunan pada indikator angka pengangguran Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 adalah 3,63 persen. Berdasarkan *release* data BPS periode Februari 2020 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah 4,56 persen. Terjadi peningkatan angka TPT sebesar 0,11 persen jika dibandingkan dengan periode

sebelumnya (Agustus 2019) sebesar 4.45 persen, sehingga pada periode ini belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Grafik I.2
Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Barat

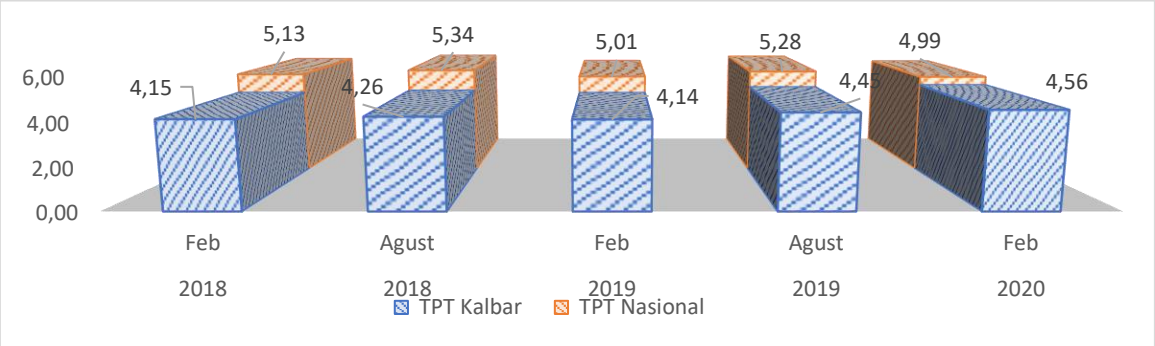

Sumber data : BPS Provinsi Kalimantan Barat, (diolah)

Jumlah pengangguran Februari 2020 sebanyak 117,404 jiwa, mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Hal ini disebabkan penurunan daya serap tenaga kerja. Pada Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan masih merupakan sektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 45,20 persen walaupun terjadi penurunan sebesar 3,38 persen, Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi sebesar 22,19 persen, dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebesar 13,18 persen. Penyerapan tenaga kerja pada periode ini didominasi lebih dari separuh penduduk yang bekerja dengan berpendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 48,97 persen dan terlihat semakin tinggi tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja semakin rendah. Sedangkan persentase jumlah pengangguran terbesar pada tingkat pendidikan SD ke bawah adalah sebesar 32,25 persen mengalami penurunan sekitar 1,32 persen. Sementara itu pengangguran pada tingkat pendidikan S1 ke atas sebesar 9,59 persen mengalami penurunan sekitar 0,95 persen. Pengangguran ini terjadi sebagai akibat dari tidak mampunya pasar tenaga kerja menyerap tenaga kerja yang ada.

3. Tingkat Kemiskinan

Sasaran angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 ditetapkan sebesar 6,92 persen sedangkan tahun 2020 ditetapkan sebesar 6,43 persen. Berdasarkan data yang telah dirilis BPS pada periode September 2019, Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan sebesar 7,28 persen. Angka ini masih lebih baik apabila dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Nasional yang mencapai sebesar 9,22 persen.

Grafik I.4
Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat

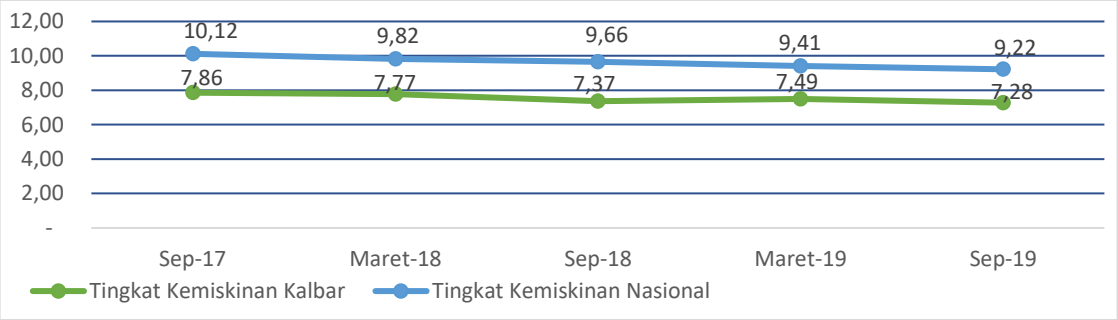

Sumber :BPS Kalimantan Barat dan Nasional

Angka tingkat kemiskinan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan periode Maret 2019 yang mencapai sebesar 7,49 persen. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Barat yang mengalami pengurangan sebanyak 7.940 orang dari periode Maret 2019 yaitu sebanyak 378.410 orang menjadi 370.470 orang pada periode September 2019.

Grafik I.5
Indeks Kedalaman dan Keparahan Provinsi Kalimantan Barat

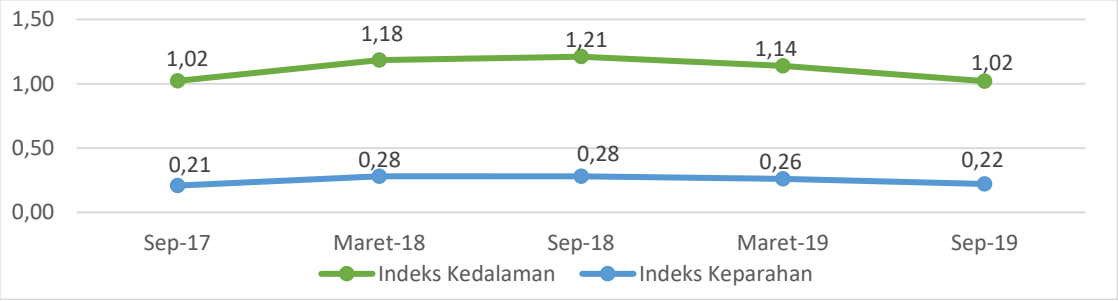

Sumber :BPS Kalimantan Barat dan Nasional

Pada periode bulan September 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,122 persen yakni sebesar 1,024 ersen dibandingkan periode Maret 2019 yang hanya 1,14 persen. Kondisi ini menunjukan adanya penurunan, walaupun rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk miskin terjadi peningkatan dari semula sebesar Rp438.555,- menjadi sebesar Rp452.899,- hal ini masih didominasi peranan sumbangan komoditi makanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan peranan komoditi bukan makanan terhadap garis kemiskinan yaitu sebesar 77,65 persen, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin masih relatif besar selama bulan Maret 2019 sampai dengan September 2019.

Indeks Keparahan kemiskinan juga menunjukan adanya penurunan yaitu 0,256 pada Maret 2019 menjadi 0,218 pada September 2019, dengan tingkat keparahan kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan dari 0,170 pada Maret 2019 menjadi 0,194 pada bulan September 2019 sedangkan daerah perdesaan mengalami penurunan dari 0,303 pada bulan Maret 2019 menjadi 0,231 pada bulan September 2019 hal ini menunjukan masih adanya ketimpangan pengeluaran antar sesama penduduk miskin terutama di daerah perdesaan masih tinggi.

Keraton Kadariah, Pontianak

BAB II
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

BAB II
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Perkembangan realisasi pendapatan dan belanja negara lingkup Provinsi Kalimantan Barta Triwulan I tahun 2020 untuk realisasi pendapatan negara mencapai 19,42 persen dari target, sedangkan realisasi belanja negara telah mencapai 20,60 persen dari pagu anggaran. Kontribusi pendapatan negara terhadap APBN Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan periode triwulan ini mencapai sebesar Rp1.893,021 miliar, hal tersebut belum cukup untuk menutupi belanja negara sebesar Rp6.425,66 miliar sehingga terjadi defisit sebesar Rp4.532,64 miliar.

Tabel II.1
Pagu dan Realisasi APBN Lingup Provinsi Kalimantan Barat
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2019 dan Tahun 2020

(dalam miliar Rp)

URAIAN		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Target/Pagu	Realisasi	Target/Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA		**8,516.17**	**2,351.40**	**9,605.55**	**1,804.34**
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI		**8,516.17**	**2,351.40**	**9,605.55**	**1,804.34**
1	Penerimaan Pajak	7,823.35	1,924.59	8,452.28	1,475.49
2	PNBP	455.08	237.72	733.78	155.50
3	Bea dan Cukai	237.74	189.09	419.49	173.35
II. HIBAH		**-**	**-**	**-**	**-**
1	Hibah	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA		**29,641.05**	**6,207.29**	**31,191.69**	**6,425.66**
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT		**8,949.71**	**1,259.70**	**10,519.90**	**1,294.38**
1	Belanja Pegawai	3,205.25	675.32	3,768.72	723.21
2	Belanja Barang	3,774.46	486.44	3,836.94	441.66
3	Belanja Modal	1,956.72	97.94	2,902.89	129.51
4	Belanja Bantuan Sosial	13.28	-	11.35	-
5	Belanja Lain-lain	-	-	-	
II.TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA		**20,691.34**	**4,947.59**	**20,671.79**	**5,131.28**
1	Transfer ke Daerah	18,698.77	4,570.39	18,629.16	4,936.95
	a. Dana Perimbangan	18,571.24	4,506.62	18,333.38	4,936.95
	1) Dana Alokasi Umum	12,122.39	4,025.97	12,317.06	4,056.14
	2) Dana Bagi Hasil	792.47	97.16	599.10	34.75
	3) Dana Alokasi Khusus	5,656.38	383.49	5,417.22	846.06
	b. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	c. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-
	d. Dana Transfer Lainnya	127.53	63.77	295.78	-
2	Dana Desa	1,992.57	377.20	2,042.63	194.33
C. SURPLUS DEFISIT		**(21,124.88)**	**(3,855.89)**	**(21,586.14)**	**(4,621.32)**

Sumber data :Monev Pa, OM SPAN, Kanwil Pajak Prov. Kalimantan Barat, Kanwil BC Prov. Kalimantan Barat

A. Pendapatan Negara

Capaian penerimaan perpajakan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan triwulan I 2020 sebesar Rp 1.47 triliun atau tercatat 24.60 persen dari target tahun 2020 yang sebesar Rp8.45 triliun. Terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp197,75 miliar atau 15,48 persen jika dibandingkan dengan penerimaan periode yang sama tahun 2019.

1. Penerimaan Perpajakan

a. Pajak Penghasilan

Grafik II.1
Realisasi Penerimaan PPh sd Triwulan I 2020 Provinsi Kalimantan Barat

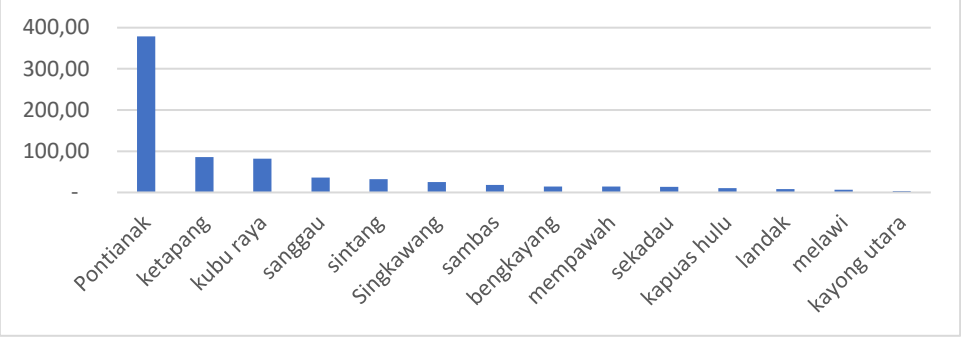

sumber data OMSPAN

Penerimaan PPh Kalimantan Barat sampai dengan bulan Maret 2020 adalah sebesar Rp729,76 tumbuh 0,99 persen jika dibandingkan dengan penerimaan PPh periode yang sama tahun sebelumnya. Memberikan kontribusi 49.46 persen terhadap total penerimaan pajak. Wilayah penerimaan Pontianak Barat memberikan kontribusi penerimaan PPh terbesar yaitu Rp379,05 miliar atau 51,94 persen hal ini disebabkan terkonsentrasinya tenaga kerja yang bekerja di Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian. Disusul penerimaan dari wilayah Kab. Ketapang yang didukung dengan keberadaan kawasan industri Ketapang memberikan kontribusi sebesar Rp85,89 miliar atau 11,77 persen.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Grafik II.2
Realisasi Penerimaan PPn s.d. Triwulan I 2020 Provinsi Kalimantan Barat

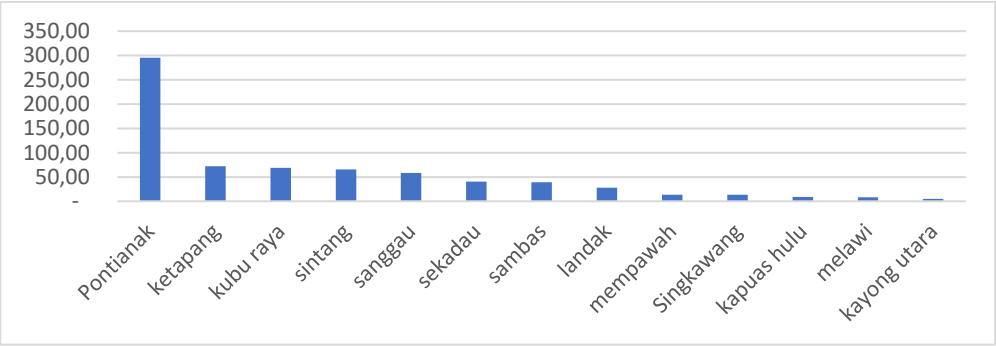

Sumber data OMSPAN

Penerimaan PPn di Kalimantan Barat di triwulan I 2020 mencapai Rp708,96 miliar atau 48,05 persen terhadap total penerimaan pajak, mengalami kenaikan 28,88 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Kenaikan ini di dorong oleh peningkatan penjualan komoditas barang konsumsi. Kota Pontianak sebagai pusat perekonomian menjadi kontributor terbesar dalam menyumbang penerimaan PPn yaitu sebesar Rp295,44 miliar atau 41,67 persen, disusul oleh Kabupaten Ketapang sebesar Rp71,80 miliar atau 10.13 persen. Sementara itu Kubu Raya memberikan kontribusi terbesar ketiga sebesar Rp68,88 miliar atau 9,72 persen.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Grafik II.3
Realisasi Penerimaan PPnBM sd Triwulan I 2020
Provinsi Kalimantan Barat

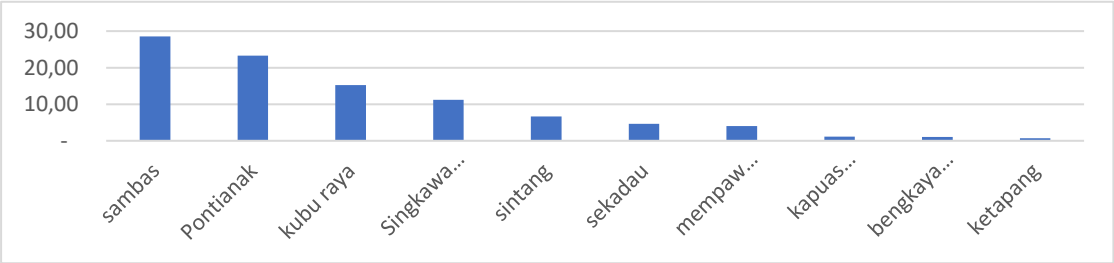

Sumber data OMSPAN

PPNBM merupakan pajak yang dipungut atas konsumsi suatu barang mewah. Di Provinsi Kalimantan Barat penerimaan PPnBM sampai bulan Maret 2020 sebesar Rp96,47 juta atau 0.01 persen terhadap total penerimaan pajak dan sebagian besar berasal dari Sambas sebesar Rp28,53 miliar atau 29,58 persen. Disusul penerimaan dari wilayah Kota Pontianak sebesar Rp23,28 juta atau 24,14 persen.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmijdi mengusulkan para pelaku usaha di manapun selama usahanya beroperasi di Kalimantan Barat agar memiliki (Nomor Pokok Wajib Pajak) NPWP Kalimantan Barat. Dengan memiliki NPWP Kalimantan Barat akan membantu pembiayaan pembangunan di Kalimantan Barat.Kalau NPWP di luar Kalimantan Barat maka pajaknya diterima daerah luar padahal perusahaan beroperasi di Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini separo lebih daerah di Indonesia termasuk Kalimantan Barat ketergantungan dana dari pusat rata-rata lebih dari 70 persen. *Kalimantan Barat.antaranews*

d. Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai

Grafik II.4
Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai
Triwulan I 2020

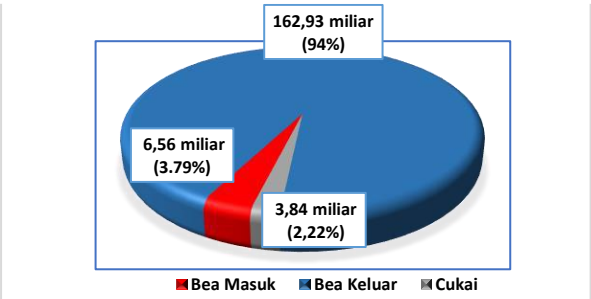

Tercatat penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai sampai dengan triwulan I 2020 mencapai Rp173,34 miliar menurun 8,33 persen bila dibandingkan penerimaan periode yang sama tahun sebelumnya. dengan perincian Bea masuk Rp6,56 miliar atau 3,79 persen , Bea Keluar Rp162,93 miliar atau 94,00 persen dan Cukai Rp3,84 miliar atau 2,22 persen. Berdasarkan perkembangan ekspor dan impor luar negeri Kalimantan Barat, sepanjang triwulan I 2020 terpantau masih berada pada kondisi surplus, hal ini terjadi seiring dengan peningkatan yang lebih tinggi pada komponen ekspor luar negeri terhadap impor luar negeri. Neraca perdagangan luar negeri Kalimantan Barat pada triwulan I 2020 mengalami surplus sebesar Rp153,19 miliar.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan PNBP terdiri dari 4 jenis yakni PNBP Sumber Daya Alam (SDA) , PNBP Badan Layanan Umum (BLU), PNBP Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan PNBP Lainnya. Untuk wilayah Kalimantan Barat hanya terdiri atas PNBP Lainnya dan PNBP BLU, tidak terdapat penerimaan PNBP Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan juga PNBP SDA, meskipun di wilayah Kalimantan Barat terdapat usaha pertambangan, dikarenakan PNBP SDA merupakan penerimaan terpusat dan langsung masuk ke Bagian Anggaran BUN.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi Kalimantan Barat sampai triwulan I 2020 berjumlah Rp155,50 miliar . Jumlah ini mengalami penurunan 34,58 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Penerimaan terbesar terjadi di bulan Maret 2020 sebesar Rp57,38 miliar. Penerimaan PNBP triwulan I 2020 berasal dari PNBP lainnya Rp 129,69 miliar dan PNBP BLU sebesar Rp25,81 miliar.

a. PNBP lainnya

Grafik II.5
Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Periode Triwulan I 2020

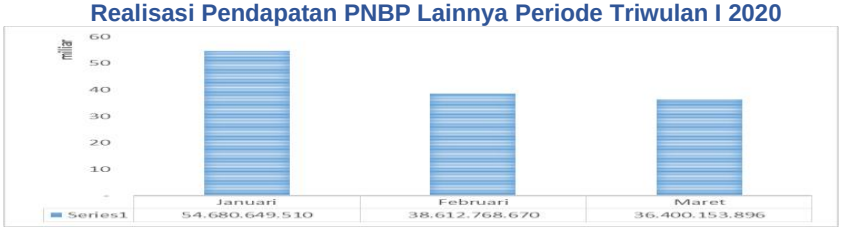

sumber data OMSPAN

Pendapatan PNBP lainnya pada periode triwulan I 2020 ini memberikan kontribusi sebesar Rp129,69 miliar atau 83.40 persen dari total penerimaan PNBP. Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari senilai Rp54.68 miliar diikuti penerimaan bulan Februari Rp38,61 miliar dan bulan Maret sebesar Rp36,40 miliar. Komposisi pendapatan terbesar adalah pendapatan Pelayanan Kepolisian I sebesar Rp25.19 miliar disusul pendapatan pendidikan sebesar Rp 20.25 miliar. Besarnya pendapatan pelayanan Kepolisian ini didominasi oleh Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebesar Rp8,49 miliar atau 33.72 persen. Selanjutnya Pendapatan Penerbitan STNK sebesar Rp7,44 miliar atau 29.54 persen.

b. PNBP BLU

Grafik II.6
Realisasi Pendapatan PNBP BLU Periode Triwulan I 2020

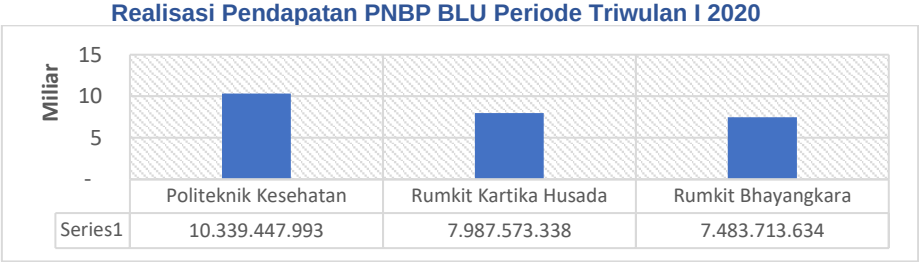

sumber data OMSPAN

Terdapat empat satker BLU di Provinsi Kalimantan Barat yakni RS Bhayangkara Pontianak, Politeknik Kesehatan Pontianak , Universitas Tanjung Pura Pontianak dan Rumkit Kartika Husada. Sampai dengan akhir triwulan I 2020 pendapatan PNBP BLU tercatat sebesar Rp25,81 miliar . Pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 16,60 persen dari total penerimaan PNBP . Dari sektor pendidikan Politeknik Kesehatan Pontianak menyumbang sebesar Rp10.33 miliar atau 40,06 persen. Sedangkan dari sektor kesehatan, Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah sakit Kartika Husada berkontribusi sebesar Rp15,47 miliar atau 59,94 persen.

B. Belanja Negara

Belanja negara lingkup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah dan Dana Desa, adapun perkembangan pada Triwulan I Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Belanja Pemerintah Pusat

Grafik II.7
Tren Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2020

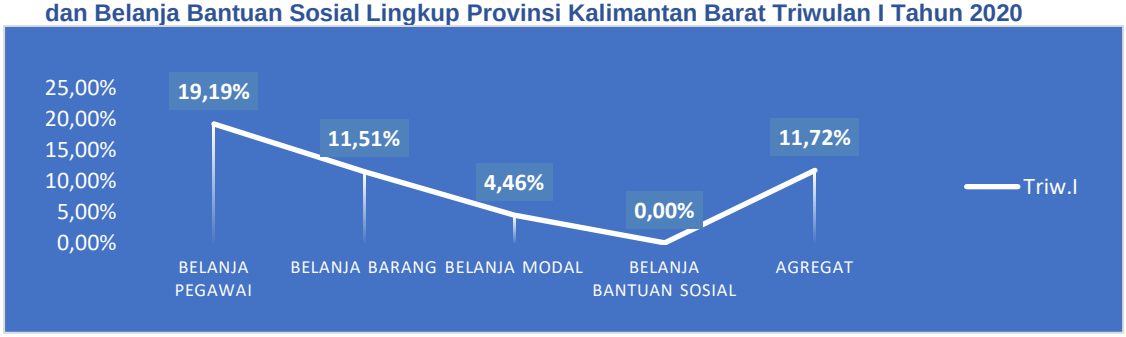

Sumber data: Monev PA(diolah)

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada triwulan I tahun 2020 sebesar Rp1.294,38 milliar atau 12,30 persen dari pagu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 1,77 persen. Realisasi belanja yang terbesar yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp723,21 miliar atau 19,19 persen, hal ini disebabkan adanya rutinitas pembayaran Gaji Pegawai tahun 2020, sedangkan belanja yang lainya belum maksimal terutama belanja bantuan sosial belum terdapat realisasi.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Grafik II.8
Tren Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Lingkup Prov. Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2020

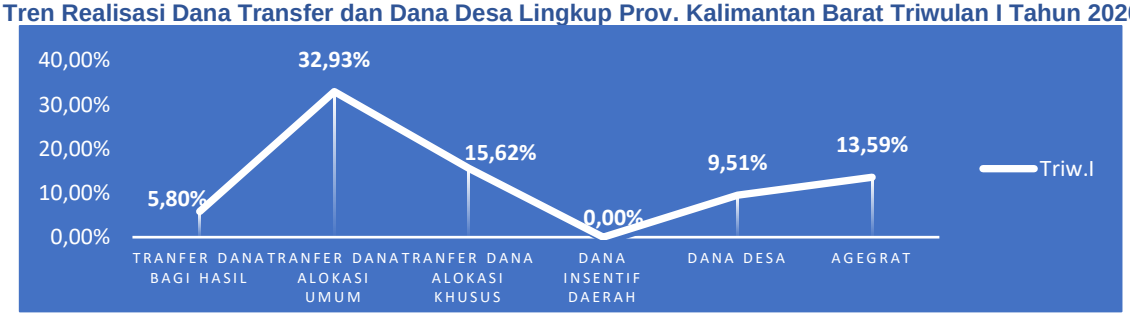

Sumber data: Monev PA (diolah)

Realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa sampai dengan Triwulan I tahun 2020 sebesar Rp5.131,28 miliar atau 24,82 persen dari pagu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 0,91 persen. Realisasi Belanja DAU sebesar Rp4.056,14 miliar atau 32,93 persen, Belanja DBH sebesar Rp34,75 miliar atau 5,80 persen, Belanja DAK sebesar Rp846,06 miliar atau 15,62 persen, dan Transfer Dana Desa sebesar Rp194,33 miliar atau 9,51 persen, sedangkan Belanja Tranfer lainnya masih belum terdapat realisasi.

3. Pengelolaan BLU

Perkembangan BLU diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.2
Perkembangan Realisasi Belanja Satker BLU di Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I 2019 dan Triwulan I 2020

Satker BLU	2019				2020			
	RM		BLU		RM		BLU	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Rumkit Bhayangkara	6,81	1,73	32,00	6,61	7,4	2,13	31,50	6,23
Politeknik Kesehatan	42,49	6,98	27,06	1,32	46,55	5,79	28,09	1,21
Universitas Tanjungpura	192,15	35,46	209,60	7,75	212,48	35,38	194,09	
Rumkit Kartika Husada	Belum Menjadi Satker BLU				16,32	2,91	46,96	8,08

Sumber: monevPa

Tahun 2020 dalam wilayah kerja Kanwil DJPB Kalimantan Barat terdapat 4 (empat) satker BLU yakni Rumah Sakit Bhayangkara, Politeknik Kesehatan Pontianak, Universitas Tanjung Pura Pontianak dan Rumah Sakit Kartika Husada. Satker BLU Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak memiliki layanan kesehatan unggulan DVI (*Disaster Victim Identification*) serta pembuatan VER (*Visum et Repertum*). Tahun 2020 RS Bhayangkara memiliki pagu anggaran sebesar Rp38.95 miliar yang terdiri dari pagu RM sebesar Rp7.45 miliar dan pagu BLU sebesar Rp 31,50 miliar . Sampai dengan triwulan I 2020 realisasi belanja sebesar Rp8.35 miliar .

Satker BLU Politeknik Kesehatan Pontianak memberikan layanan pendidikan kesehatan meliputi jurusan kesehatan lingkungan, jurusan Gizi, Kesehan Gigi, Kebidanan, Keperawatan, serta analis kesehatan. Tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp74,64 miliar , yang terdiri dari pagu RM Rp46.55 miliar dan pagu BLU Rp28.09 miliar. Sampai dengan triwulan I 2020 realisasi belanja sebesar Rp7 miliar.

Satker BLU Universitas Tanjung Pura Pontianak merupakan satker BLU yang memberikan layanan pendidikan di sembilan fakultas dengan jenjang pendidikan hingga strata tiga. Tahun 2020 memiliki pagu anggaran sebesar Rp406.57 miliar serta realisasi sampai dengan triwulan I 2020 sebesar Rp35.38

Rumkit kartika Husada merupakan satker yang menjalankan pengelolaan keuangannya sebagai BLU pada tahun 2020 dengan pagu total sebesar Rp63,28

miliar dengan perincian pagu BLU sebesar Rp46,96 miliar atau 74,21 persen dan pagu RM Rp16,32 miliar atau 25,79 persen.

4. Manajemen Investasi Pusat

Dalam rangka peningkatan pembangunan di Wilayah Kalimantan Barat, Pemerintah berusaha memperdayakan potensi yang ada guna mendukung pembangunan ekonomi di daerah, diantaranya berupa Dana Invstasi Pusat yang diberikan melalui pinjaman kepada Pemda Singkawang sebagai berikut:

Tabel II.3
Ringkasan Rekonsiliasi Outstanding Pinjaman BUMD dan Pemda Tahun 2020

No.	Instansi	No. Perjanjian	No. Loan (ID)	Sisa Pinjaman	Keterangan
1	Pemerintah Kota Singkawang	RDA-236/DP3/1996	2094101	17.666.354.370,24	Diselesaikan melalui program restrukturisasi sesuai surat Walikota Singkawang Nomor: 900/983/BKD tanggal 11 Oktober 2017, berdasarkan surat Direktur SMI nomor S-11978/PB/2017 tanggal 29 Desember 2017 persetujuan rencana pelaksanaan *debt swap*

Sumber: Kanwil DJPB

Sampai dengan triwulan I tahun 2020 masih terdapat 1 (satu) pinjaman BUMD dan Pemda atas nama debitur Pemerintah Kota Singkawang dengan sisa hutang sebesar Rp17.666.354.370,24 yang telah diselesaikan melalui proses pelaksanaan *debt swap* sebesar Rp13.986.919.287,15 dan penghapusan utang murni Rp3.679.435.083,09. Pemerintah Kota Singkawang telah merealisasikan program debt swap dengan alokasi APBD tahun anggaran 2017 melalui DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa kegiatan Pembangunan Bangsal Ruang Inap Kelas I RSUD Abdul Aziz di Singkawang dengan realisasi sebesar Rp14.407.200.000 dan menunggu penetapan penghapusan pinjaman.

Investasi Pemerintah Pusat lainnya adalah Program Kredit Program berupa pemberian tambahan modal usaha kepada UMKM Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dalam triwulan I tahun 2020 telah mencapai sebesar Rp473,32 miliar (11.006 UMKM/debitur).

Tabel II.5
Penyaluran KUR Wilayah Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2020

No.	Kab./Kota	2018		2019		SD tanggal 31 Maret 2020	
		Akad	Debitur	Akad	Debitur	Akad	Debitur
1	Kalimantan Barat	1,650,000,000	29	1,065,000,000	33	100,000,000	3
2	Kab. Sambas	172,012,480,000	5,063	178,681,490,000	4,825	60,925,305,015	1,478
3	Kab. Mempawah	117,141,764,400	3,853	121,073,374,245	4,303	34,363,518,000	1,019
4	Kab. Sanggau	137,303,602,000	3,683	152,414,178,000	3,851	47,899,025,800	1,103
5	Kab. Ketapang	134,775,029,932	3,445	116,041,054,000	3,337	36,422,400,000	924
6	Kab. Sintang	169,583,544,950	3,539	214,383,212,000	3,821	39,032,500,000	777
7	Kab. Kapuas Hulu	74,602,388,591	2,755	101,021,500,000	3,415	20,578,000,000	637
8	Kab. Bengkayang	62,169,980,000	1,909	61,622,265,000	2,073	19,391,095,000	510
9	Kab. Landak	84,971,200,000	2,710	99,773,000,000	2,929	30,063,500,000	873
10	Kab. Sekadau	82,259,245,000	1,715	76,000,490,000	1,679	13,912,000,000	323
11	Kab. Melawi	60,856,245,000	1,378	84,595,707,561	1,311	16,797,000,000	339
12	Kab. Kayong utara	24,188,290,000	826	25,194,500,000	849	5,272,820,000	168
13	Kab. Kubu Raya	151,025,480,000	3,883	194,900,370,000	4,512	46,682,500,000	1,104
14	Kota Pontianak	256,541,689,000	4,730	286,042,599,288	5,622	78,255,800,000	1,351
15	Kota Singkawang	85,998,890,400	1,993	95,388,730,108	1,938	23,628,659,330	397
		1,615,079,829,273	**41,511**	**1,808,197,470,202**	**44,498**	**473,324,123,145**	**11,006**

Sumber: SIKP (diolah)

C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan realisasi APBN sampai dengan akhir tahun 2020 diperoleh dengan menggunakan penghitungan analisa tren dan atau rata-rata untuk penerimaan pendapatan dan belanja negara melalui data historis tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sehingga ditemukan perkiraan pendapatan dan belanja negara di Prov. Kalimantan Barat sampai Triwulan IV tahun 2020.

Tabel II.6
Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Kalimantan Barat s.d. Triwulan IV Tahun 2020

(Dalam miliar)

URAIAN		Target / Pagu	Realisasi s.d Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d Triwulan IV	
			Rp	% Realisasi terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi terhadap Pagu
PENDAPATAN NEGARA		**9,605.55**	**1,804.34**	**18.78%**	**8,727.98**	**90.25%**
1	**Penerimaan Pajak**	8,452.28	1,475.49	17.46%	7,310.38	86.49%
2	**PNBP**	733.78	155.50	21.19%	859.26	117.10%
3	**Bea dan Cukai**	419.49	173.35	41.32%	558.34	133.10%
4	**Hibah**	-	-	0.00%	-	0.00%
BELANJA NEGARA		**31,191.69**	**6,425.66**	**20.60%**	**29,790.42**	**95.51%**
1	**Belanja Pemerintah Pusat**	10,519.90	1,294.38	**12.30%**	9,885.55	93.97%
2	**Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa**	20,671.79	5,131.28	**24.82%**	19,904.87	96.29%
SURPLUS DEFISIT		**(21,586.14)**	**(4,621.32)**		**(21,062.44)**	

Sumber data: Monev PA, OMSPAN

Perkiraan Pendapatan Negara sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebesar Rp7.313,03 miliar atau 86,49 persen, perkiraan PNBP sebesar Rp859,26 miliar atau 189,32 persen, penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp745,96 miliar atau 133,10 persen. sedangkan penerimaan Hibah perkiraan sebesar Rp0,00 miliar atau 0,00 persen.

Perkembangan Pendapatan Negara sampai dengan periode triwulan I tahun 2020 sebesar 19,42 persen dari target atau pagu yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp9.749,58 miliar, yang terdiri dari realisasi Penerimaan Pajak telah mencapai sebesar Rp1.541,52 miliar atau 18,23 persen dari pagu, realisasi penerimaan PNBP sebesar Rp170,58 miliar atau 23,25 persen, realisasi penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp180,92 miliar atau 32,28 persen. sedangkan realisasi penerimaan Hibah sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen

Perkiraan belanja Negara sampai dengan triwulan IV tahun 2020 akan mencapai sebesar Rp29.790,42 miliar atau 95,51 persen dari total pagu APBN, termasuk didalamnya untuk belanja pemerintah pusat diperkirakan sebesar Rp9.885,55 miliar atau 93,97 persen dan belanja transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan akan terserap sebesar Rp19.904,87 miliar atau 96,29 persen. Perkembangan penyerapan anggaran sampai pada triwulan I 2020 telah mencapai sebesar Rp1.294,38 miliar atau 12,30 persen, didominasi oleh belanja pegawai yang mencapai sebesar Rp723,21 miliar atau 19,19 persen sedangkan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa didominasi oleh Belanja Dana Alokasi Umum sebesar Rp4.056,14 miliar atau 32,93 persen dan belanja Belanja Dana Intensif Daerah belum terdapat realisasi penyerapan.

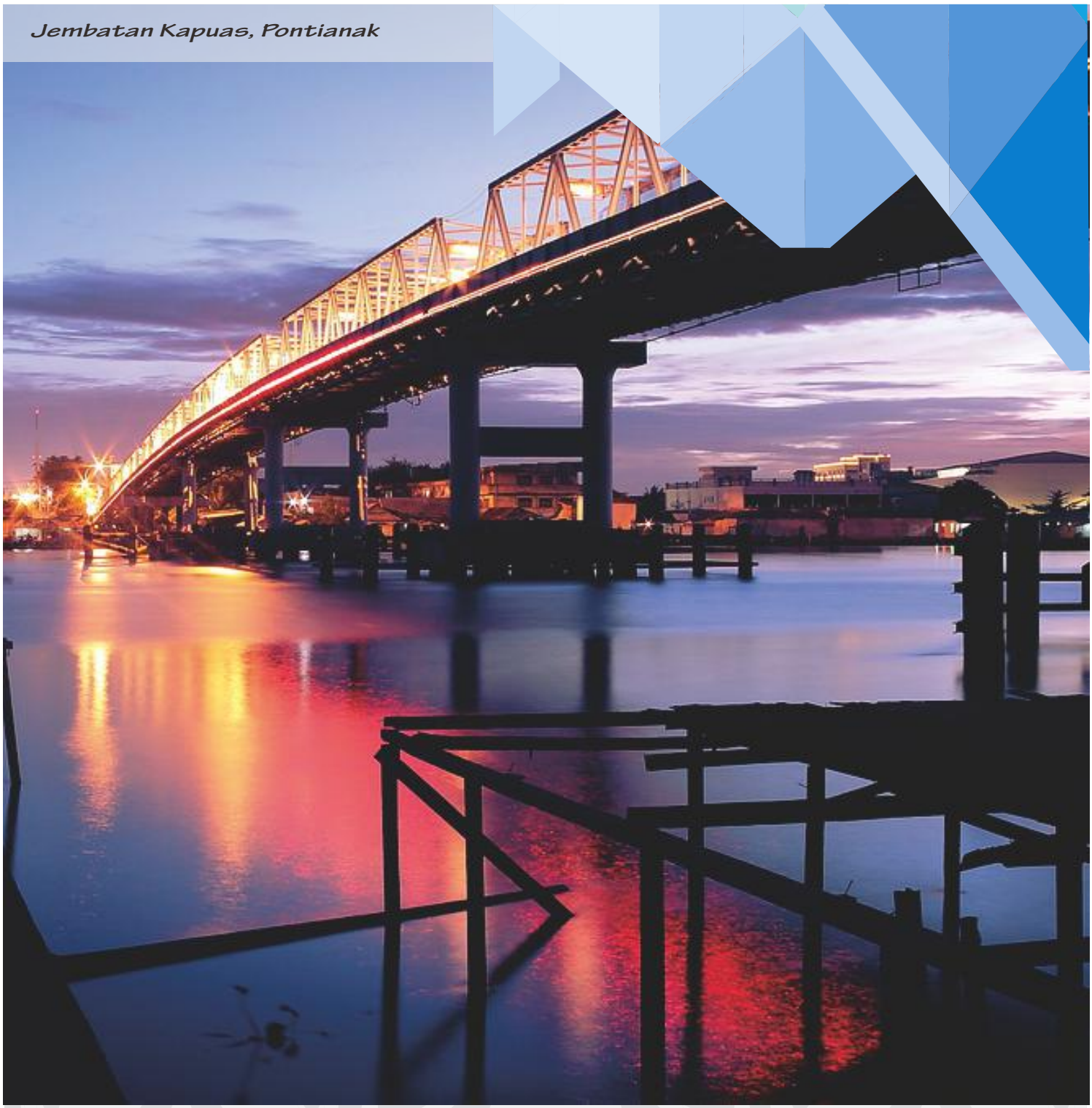

Jembatan Kapuas, Pontianak

BAB III
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

BAB III
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Perkembangan realisasi APBD lingkup Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I tahun 2020 untuk realisasi pendapatan mencapai 19.99% dari target sedangkan realisasi belanja mencapai 8,14% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.1
Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Barat akhir Triwulan I Tahun 2019/2020

(miliar rupiah)

URAIAN	2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	**25.434,50**	**5.264,68**	**26.332,80**	**5.281,71**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**3.762,76**	**699,95**	**4.601,06**	**750,41**
Pajak Daerah	2.579,41	565,52	3.029,92	584,28
Retribusi Daerah	145,54	26,14	154,53	40,99
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	181,17	0,00	200,28	0,01
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	856,64	108,29	1.216,33	125,13
PENDAPATAN TRANSFER	**20.721,81**	**4.522,42**	**18.025,72**	**4.522,30**
Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak	781,28	84,94	597,79	28,22
Dana Alokasi Umum	12.122,39	3.701,94	12.343,75	3.998,64
Dana Alokasi Khusus	5.656,38	365,46	5.084,18	463,41
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	691,29	0,04	812,21	25,67
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.470,48	370,03	1.569,44	6,37
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	4,10	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**949,92**	**42,30**	**3.706,02**	**9,00**
Pendapatan Hibah	389,08	0,00	509,05	0,62
Pendapatan Lainnya	560,84	42,30	811,22	8,38
BELANJA DAERAH	**26.044,05**	**1.989,62**	**27.285,48**	**2.132,61**
BELANJA OPERASI	**16.911,08**	**1.910,45**	**18.190,42**	**1.966,99**
Belanja Pegawai	9.357,25	1.242,33	9.504,02	1.269,46
Belanja Barang	5.996,93	399,33	6.825,69	527,48
Belanja Bunga	7,03	2,88	2,00	1,55
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	1.459,40	174,60	1.792,77	166,81
Belanja Bantuan sosial	90,47	91,30	65,94	1,68
BELANJA MODAL	**5.202,12**	**18,04**	**5.133,77**	**33,09**
Belanja Modal	5.202,12	18,04	5.133,77	33,09
BELANJA TAK TERDUGA	**32,13**	**0,39**	**49,64**	**8,52**
Belanja Tak Terduga	32,13	0,39	49,64	8,52
BELANJA TRANSFER	**3.898,72**	**60,74**	**3.911,64**	**124,01**
Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	874,58	0,00	785,97	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	3.024,14	60,74	3.125,67	124,01
SURPLUS/DEFISIT	**-609,55**	**3.275,06**	**-952,68**	**3.149,10**

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah.

Realisasi Pendapatan Daerah pada Triwulan I tahun 2020 sebesar Rp 5.281,71 miliar atau 20,06% dari target yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 0,64% dari periode yang sama tahun 2019. Distribusi realisasi pendapatan adalah sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 750,41 miliar (16,31%), Pendapatan Transfer mencapai

Rp 4.522,30 miliar (25%), sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 9 miliar (0,24%).

Realisasi Belanja mencapai Rp 2.132,61 miliar atau 7,82% dari pagu anggaran yang ditetapkan dan mengalami kenaikan sebesar 0,18% dari periode yang sama tahun 2019. Belanja Pegawai sebesar Rp 1.269,46 miliar (13,36%), Belanja Barang sebesar Rp 527,48 miliar (7,73%) dan Belanja Transfer sebesar Rp 124,01 miliar (3,17%), sedangkan Belanja Modal sebesar Rp 33,09 miliar (0,64%)

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Grafik III.1
Realisasi PAD Triwulan I Tahun 2019/2020

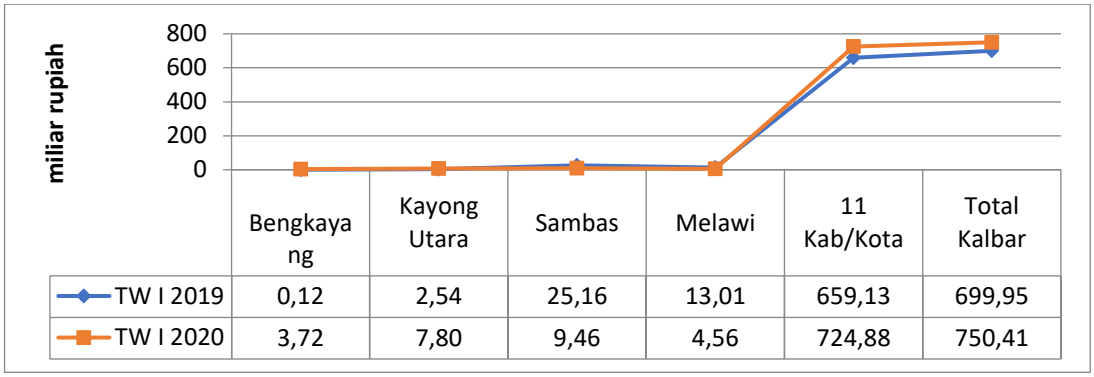

	Bengkayang	Kayong Utara	Sambas	Melawi	11 Kab/Kota	Total Kalbar
TW I 2019	0,12	2,54	25,16	13,01	659,13	699,95
TW I 2020	3,72	7,80	9,46	4,56	724,88	750,41

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah.

Pada Triwulan I tahun 2020 realisasi PAD mencapai Rp 750,41 miliar atau 16,31% dari target sebesar Rp 4.601,06 miliar, terjadi penurunan 2.29% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Prosentase kenaikan penerimaan terbesar terjadi di Kab. Bengkayang yaitu sebesar 3.052,23%, dan terendah Kabupaten Melawi (64,93%).

a. Penerimaan Pajak Daerah

Grafik III.2
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Triwulan I Tahun 2019/2020

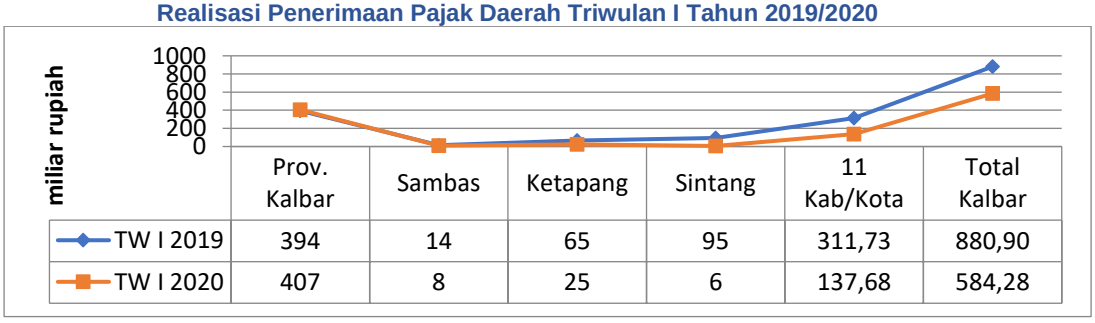

	Prov. Kalbar	Sambas	Ketapang	Sintang	11 Kab/Kota	Total Kalbar
TW I 2019	394	14	65	95	311,73	880,90
TW I 2020	407	8	25	6	137,68	584,28

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah.

Pada Triwulan I tahun 2020 Penerimaan Pajak Daerah Kalimantan Barat mencapai Rp 584,28 miliar atau 19,28% dari target sebesar Rp 3.029,92 miliar, terjadi penurunan sebesar 2,64% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Prosentase Kenaikan terbesar adalah Prov. Kalimantan Barat sebesar 3,21% dan penurunan terbesar pada Kab. Sintang sebesar (88,94%).

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik III.3
Realisasi Penerimaan Retribusi Triwulan I Tahun 2019/2020

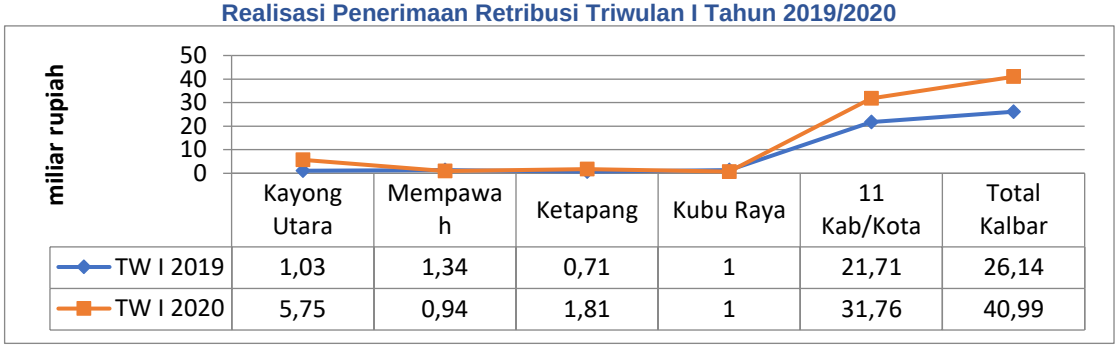

	Kayong Utara	Mempawah	Ketapang	Kubu Raya	11 Kab/Kota	Total Kalbar
TW I 2019	1,03	1,34	0,71	1	21,71	26,14
TW I 2020	5,75	0,94	1,81	1	31,76	40,99

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Pada Triwulan I tahun 2020 Penerimaan Retribusi Daerah Pemprov Kalimantan Barat mencapai Rp 40,99 miliar atau 26,53% dari target sebesar 154,53 miliar. Terjadi kenaikan sebesar 8,56% dibanding periode yang sama tahun 2019. Prosentase kenaikan terbesar terjadi pada Kab. Kayong Utara sebesar 457,71%. Penurunan terbesar dialami oleh Kubu Raya (45,83%).

c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Grafik III.4
Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Triwulan I Tahun 2019/2020

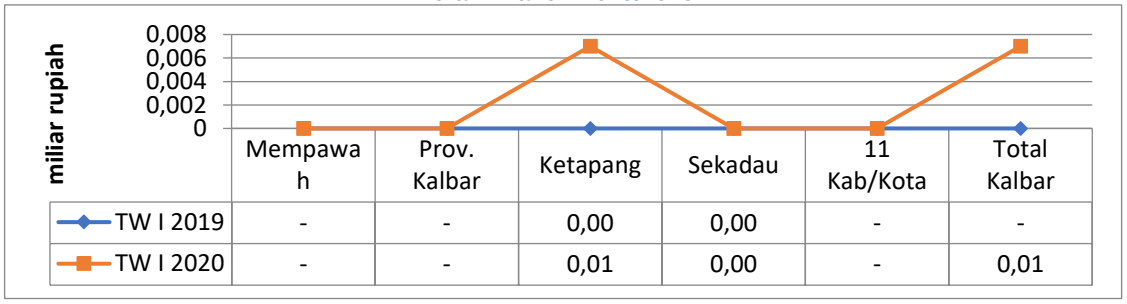

	Mempawah	Prov. Kalbar	Ketapang	Sekadau	11 Kab/Kota	Total Kalbar
TW I 2019	-	-	0,00	0,00	-	-
TW I 2020	-	-	0,01	0,00	-	0,01

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Pada Triwulan I tahun 2020 Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 0,01 miliar atau 0,003% pagu yang telah ditetapkan. Terjadi penurunan sebesar 0,003% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi baru ada pada Pemkab Ketapang.

2. Pendapatan Transfer

Grafik III.5
Realisasi Pendapatan Transfer Triwulan I Tahun 2019/2020

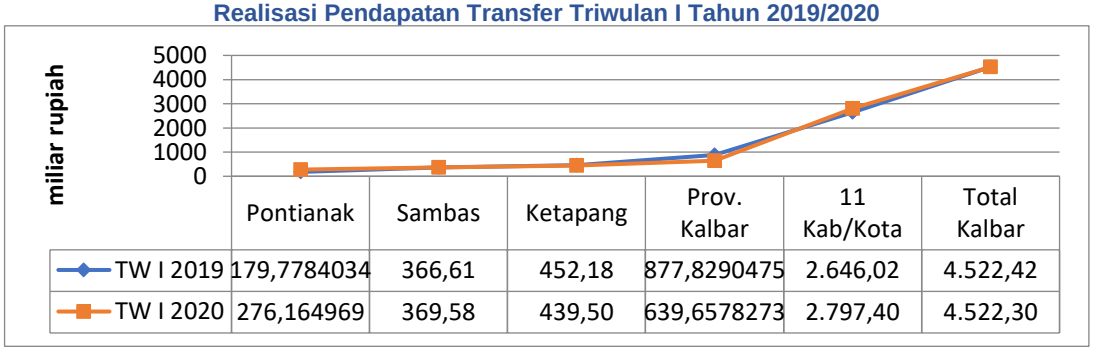

	Pontianak	Sambas	Ketapang	Prov. Kalbar	11 Kab/Kota	Total Kalbar
TW I 2019	179,7784034	366,61	452,18	877,8290475	2.646,02	4.522,42
TW I 2020	276,164969	369,58	439,50	639,6578273	2.797,40	4.522,30

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Realisasi Pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada Triwulan I tahun 2020 sebesar Rp 4.522,30 miliar atau 25,09% dari alokasi dana transfer tahun 2019 sebesar Rp 18.025,72 miliar. Prosentasi kenaikan tertinggi terjadi pada Pemkab Pontianak yaitu sebesar 56,31%. Prosentase penurunan terendah dialami Pemprov Kalimantan Barat yaitu sebesar (27,13%).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD) berupa pendapatan hibah, pendapatan darurat dan pendapatan lainnya termasuk hibah langsung yang diterima oleh Pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat pada Triwulan III Tahun 2019, adalah sebagai berikut:

Grafik III.6
Realisasi LLPD Yang Sah Triwulan I Tahun 2019/2020

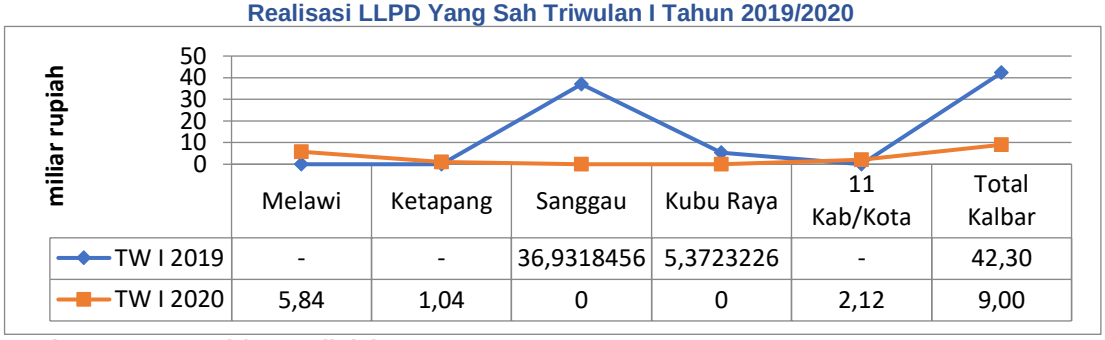

	Melawi	Ketapang	Sanggau	Kubu Raya	11 Kab/Kota	Total Kalbar
TW I 2019	-	-	36,9318456	5,3723226	-	42,30
TW I 2020	5,84	1,04	0	0	2,12	9,00

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Triwulan I tahun 2020 sebesar Rp 9 miliar atau sebesar 0,24% dari target tahun 2020 yaitu Rp 3.706,02 miliar dan terjadi penurunan sebesar 4,21% dibanding periode yang sama tahun 2019.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal

Grafik III.7
Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Triwulan I Tahun 2019/2020

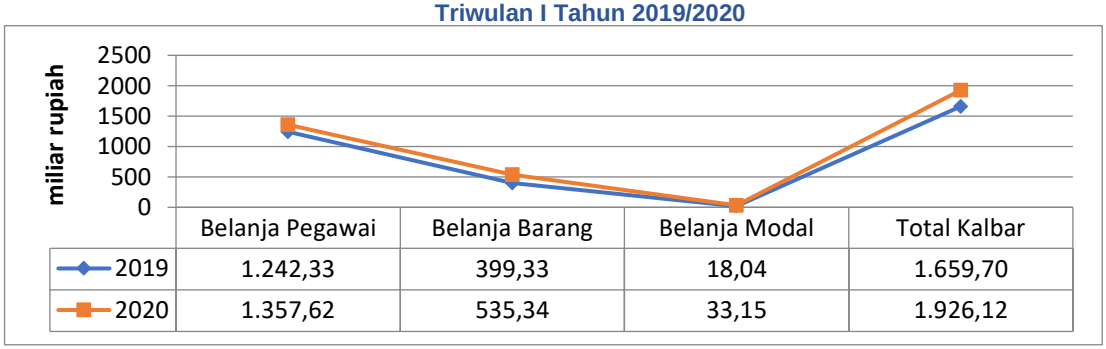

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total Kalbar
2019	1.242,33	399,33	18,04	1.659,70
2020	1.357,62	535,34	33,15	1.926,12

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah

Realisasi Belanja Pegawai pada Triwulan I tahun 2020 mencapai Rp 1.357,62 miliaratau sebesar 14,28% dari pagu dan mengalami kenaikan sebesar 1,01% dibanding periode yang sama tahun 2019. Pemprov Kalimantan Barat merupakan Pemda dengan realisasi terbesar yaitu Rp 202,39 miliar.

Realisasi Belanja Barang mencapai Rp 535,34 miliar atau 7,84% dari pagu dan mengalami kenaikan sebesar 1,18% dibanding periode yang sama tahun 2019. Prov

Kalimantan Barat merupakan Pemda dengan realisasi terbesar yaitu Rp 155,66 miliar.

Realisasi Belanja Modal mencapai Rp 33,15 miliar atau sebesar 0,65% dari pagu dan terjadi kenaikan sebesar 0,30% dibanding periode yang sama Tahun 2019. Pemprov Kalimantan Barat merupakan Pemda dengan realisasi terbesar yaitu Rp 17,92 miliar.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Grafik III.8
Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Lima Urusan Tertinggi) Triwulan I Tahun 2020

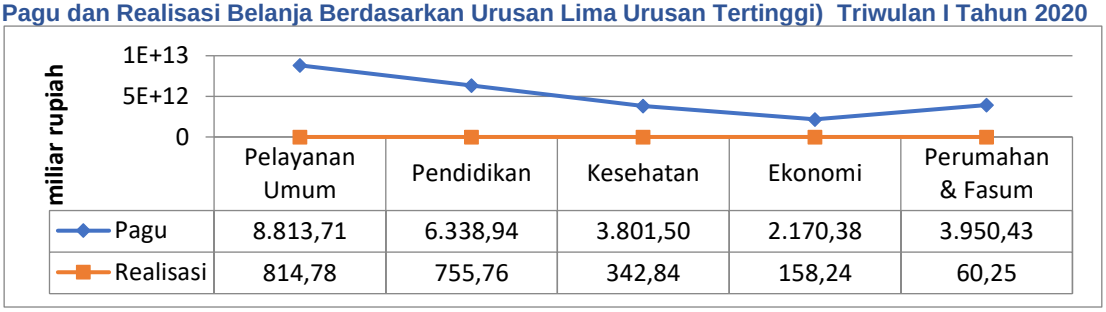

	Pelayanan Umum	Pendidikan	Kesehatan	Ekonomi	Perumahan & Fasum
Pagu	8.813,71	6.338,94	3.801,50	2.170,38	3.950,43
Realisasi	814,78	755,76	342,84	158,24	60,25

Sumber: DPKAD Kab/Kota, diolah (11 Kab/Kota)

Bidang Administrasi Pemerintahan Umum mendapat alokasi dana terbesar yaitu Rp 8.813 miliar. Bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang fasilitas umum dan kesehatan juga menjadi prioritas, hal tersebut tercermin dari besarnya alokasi dana yang dianggarkan pada tahun 2020. Bidang pendidikan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 6.338,94. Bidang perumahan dan fasilitas umum 3.950,43 miliar, bidang kesehatan mendapat alokasi dana sebesar Rp 3.801,50 dan bidang ekonomi 2.170,38 miliar.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020

Perkiraan realisasi dilakukan melalui metode analisis trend dengan mengesampingkan analisis ekonomi makro. Prognosis APBD Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Kalimantan Baratn s.d Triwulan IV Tahun 2020

Uraian	Realisasi TW IV			Prognosis TW IV
	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	23.216,40	24.229,52	25.639,28	26.717,60
Pendapatan Asli Daerah	3.464,42	3.909,03	4.046,71	4.389,00
Pendapatan Transfer	19.303,18	19.854,33	20.848,16	21.546,87
Lain-Lain Pdptn Daerah	448,80	466,16	744,42	781,73
Belanja Daerah	23.743,97	23.458,17	25.106,34	25.569,90
Belanja	20.447,49	19.798,67	21.078,45	21.177,21
Transfer	3.296,48	3.659,50	4.027,89	4.392,70
Surplus/Defisit	-527,57	771,35	532,95	1.147,70

Sumber: DPKAD (diolah)

Pendapatan Daerah pada tahun 2020 diperkirakan naik sebesar 4,21% dibanding tahun sebelumnya. Belanja Daerah diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 1,85% dari tahun sebelumnya. Peningkatan Pendapatan Daerah tersebut diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi pada masyarakat Kalimantan Barat dan menciptakan lapangan.

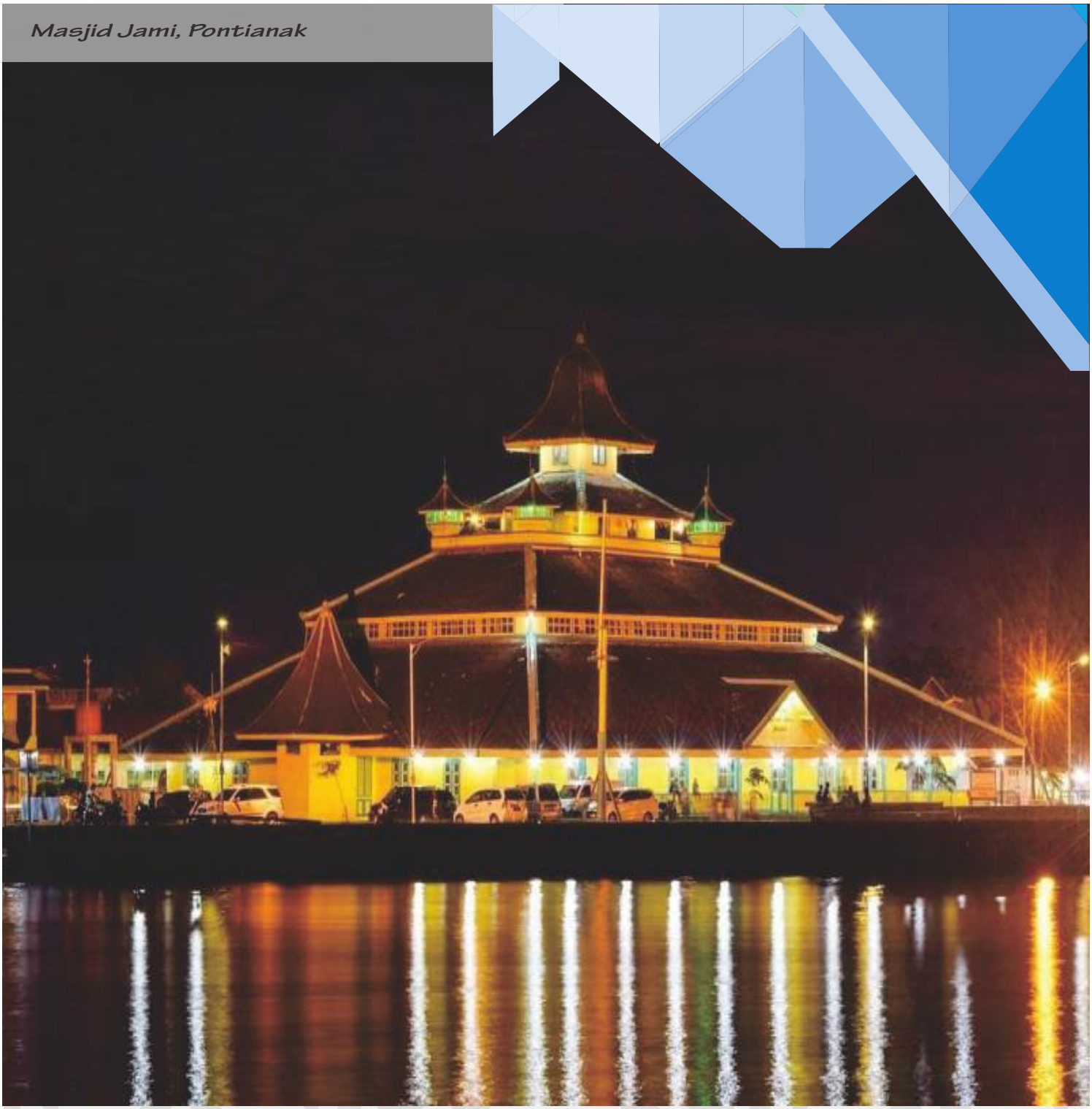

Masjid Jami, Pontianak

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

BAB IV
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat pada Triwulan I tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2019/2020

Dalam miliar

Uraian	TW I 2020			TW I 2019	Kenaikan
	Pusat	Daerah	Konsolidasian	Konsolidasian	(Turun)
Pendapatan Negara	1.714,70	628,86	2.343,56	2.309,70	33,86
Pendapatan Perpajakan	1.588,72	581,13	2.169,85	1.937,51	232,34
Pendapatan Bukan Pajak	125,98	* 165,56	166,41	372,19	-205,78
Hibah	-	7,29	7,29	-	7,29
Transer	-	*4.481,27	-	-	-
Belanja Negara	1.750,13	2.216,76	3.966,89	3.249,93	716,96
Belanja Pemerintah	1.225,26	2.089,00	3.314,26	3.188,59	125,67
Transfer	*5.131,28	127,76	652,63	61,34	591,29
Surplus/Defisit	-35,43	-1.587,90	-1.623,33	- 940,23	-683,10
Pembiayaan	29,52	-	29,52	1,27	28,25
Penerimaan Pembiayaan	29,52	-	29,52	153,91	-124,38
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	152,64	-152,64
Sisa Lebih (Kurang)	-5,91	-1.587,90	-1.593,81	- 938,96	-654,85

Catatan: *Belanja Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 4,6 triliun dieliminasi dengan PNBP Pemda sebesar Rp 125,13 miliar dan pendapat transfer Pemda sebesar Rp 4,48 triliun.

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Pendapatan konsolidasian mengalami peningkatan 1,47 persen disebabkan oleh peningkatan pendapatan perpajakan sebesar Rp 232,34 miliar rupiah dibanding periode yang sama tahun 2019. Belanja Negara mengalami penurunan 22,06 persen karena meningkatnya Transfer sebesar Rp 591,92 miliar.

B. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik IV.1
Perbandingan Komposisi pendapatan Konsolidasi Triwulan I Tahun 2019/2020

Dalam miliar

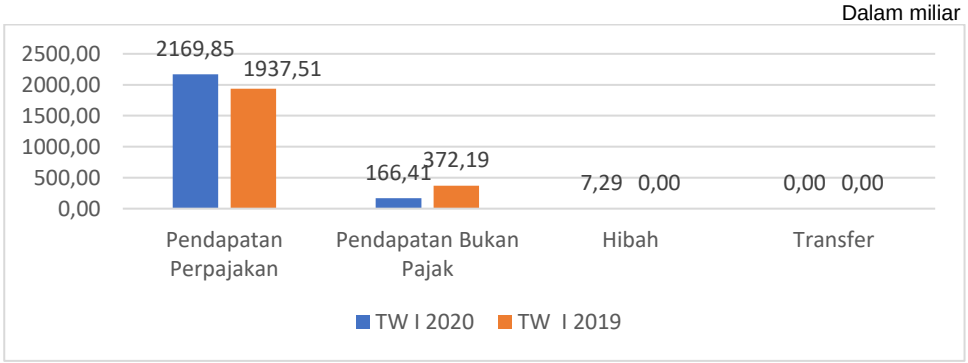

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Persentase pendapatan perpajakan mengalami peningkatan sebesar 11,99 persen sementara pendapatan bukan pajak turun 55,29 persen. Kenaikan pendapatan

perpajakantersebut antara lain disumbang oleh hasil kenaikan pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp165,69 miliar.

Grafik IV.2
Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Penerimaan Konsolidasian Triwulan I Tahun 2019/2020

Dalam miliar

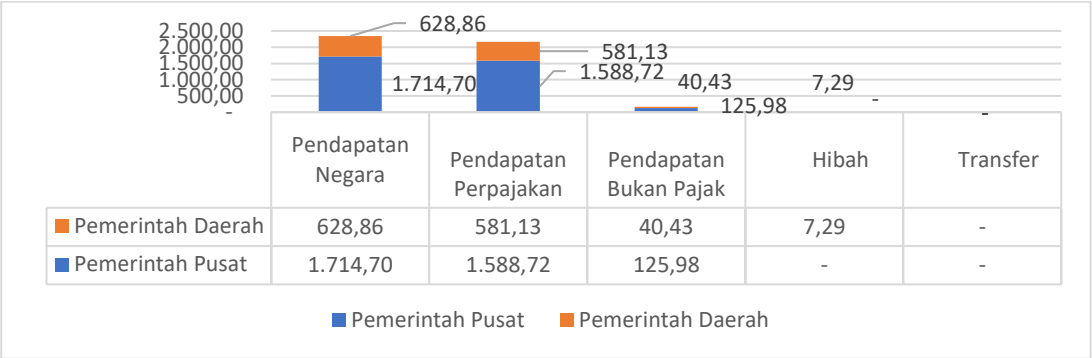

	Pendapatan Negara	Pendapatan Perpajakan	Pendapatan Bukan Pajak	Hibah	Transfer
Pemerintah Daerah	628,86	581,13	40,43	7,29	-
Pemerintah Pusat	1.714,70	1.588,72	125,98	-	-

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Pendapatan Pemerintah Pusat berkontribusi sebesar 73,16 persen terhadap pendapatan konsolidasian, sementara Pemerintah Daerah menyumbang sebesar 26,84 persen. Pendapatan Perpajakan menjadi kontributor utama pendapatan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pendapatan perpajakan berkontribusi terhadap sebesar 92,58 persen terhadap pendapatan konsolidasian.

2. Analisis Perubahan

Realisasi pendapatan konsolidasian pada triwulan I tahun 2020 mencapai Rp 2.34 triliun, naik sebesar Rp 33,86 miliar (1,47 persen) dari periode yang sama tahun 2018 yang sebesar 6,54 triliun. Kenaikan tersebut ditunjang oleh kenaikan pendapatan perpajakan sebesar 11,99 persen.

Grafik IV.3
Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I

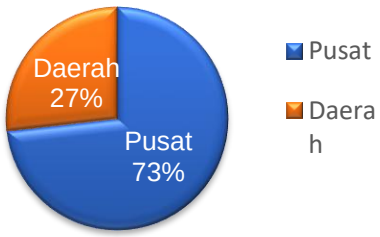

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Kontribusi pendapatan pajak pusat mencapai sebesar Rp 1,58 triliun (73,21 persen), sedangkan pendapatan pajak dari daerah sebesar Rp 581,13 miliar (26,79 persen). Pemda diharapkan untuk dapat lebih mengoptimalkan serta mencari alternatif sumber pendapatan pajak daerah. Agar komposisi pendapatan pajak mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Tabel IV.2
Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Pemda di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2019/2020

Uraian	TW I 2019 (Miliar)	TW I 2020 (Miliar)	Kenaikan (Penurunan) %
Pendapatan Perpajakan	1.937,51	2.169,85	11,99%
Pendapatan Bukan Pajak	372,19	173,70	-53,33%
Total	2.309,70	2.343,55	1,47%
Pertumbuhan Ekonomi	5,07%	2,49%	-2,58%

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Pada Triwulan I tahun 2019 dengan total pendapatan Rp 2,30 triliun, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat sebesar 5,07 persen. Sementara pada Triwulan I tahun 2020 dengan total pendapatan Rp 2,34 triliun, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2,49 persen. Terjadi anomali, dimana Pendapatan meningkat sementara pertumbuhan ekonomi menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini diakibatkan oleh mulai terpengaruhnya perekonomian secara global akibat pandemik Covid-19, sementara untuk penerimaan triwulan I belum dirasakan karena peraturan penerimaan sampai dengan akhir triwulan I belum dirubah.

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik IV.4
Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemda terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2019/2020

Miliar rupiah

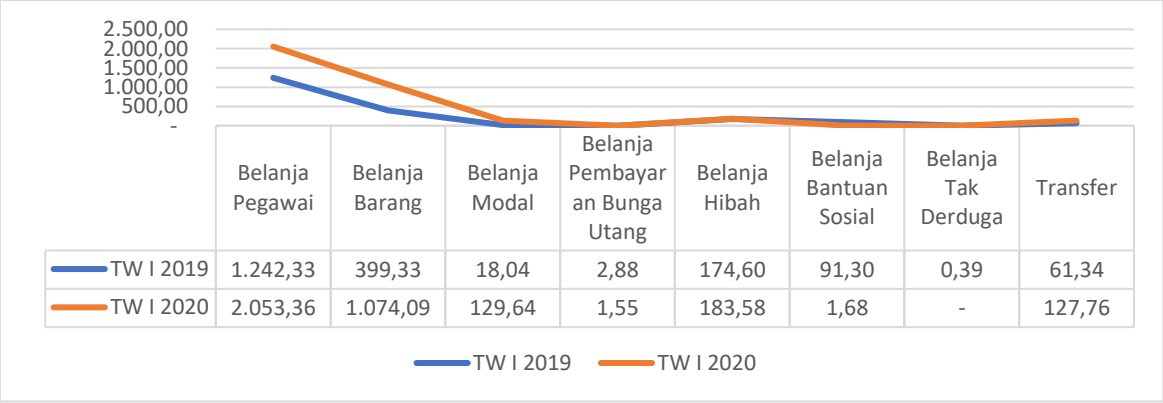

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pembayaran Bunga Utang	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Tak Derduga	Transfer
TW I 2019	1.242,33	399,33	18,04	2,88	174,60	91,30	0,39	61,34
TW I 2020	2.053,36	1.074,09	129,64	1,55	183,58	1,68	-	127,76

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Realisasi Belanja Konsolidasian pada Triwulan I tahun 2020 mencapai Rp 3,57 triliun, naik 79,46 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya belanja pegawai sebesar Rp 811,03 miliar, dan belanja barang sebesar Rp 674,76 miliar. Meningkatnya belanja YOY menunjukkan bahwa terjadi percepatan belanja Pemerintah di Kalimantan Barat.

2. Analisis Perubahan

Belanja Pegawai masih menjadi belanja yang paling besar realisasi pada triwulan I

2020. Realisasi belanja pegawai menyumbang 57,49 persen dari realisasi belanja konsolidasian. Hal ini menunjukkan masih banyaknya program Pemerintah yang masih dalam tahap perencanaan dan persiapan sehingga belanja barang dan belanja modal cenderung masih kecil realisasinya.

Grafik IV.5
Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2019/2020

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Tabel IV.3
Komposisi Belanja Negara Konsolidasian dan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun 2019/2020

Indikator	TW I 2019	TW I 2020
Belanja Konsolidasian (triliun)	3,25	3,57
PDRB ADHK (triliun)	33,75	34,62
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,14	4,56
Kemiskinan (%)	7,37	7,28

Sumber: LKPK Kanwil DJPB (diolah)

Belanja Negara konsolidasian pada Triwulan I Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 0,32 triliun, demikian juga PDRB meningkat sebesar Rp 0,87 triliun. Tingkat pengangguran terbuka meningkat 0,42 persen, dan kemiskinan menurun 0,09 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa pada triwulan I tahun 2020 belanja konsolidasian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDRB dan penurunan tingkat kemiskinan, namun berpengaruh negatif terhadap penurunan pengangguran terbuka.

D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb)

Tabel IV.4
Kontribusi Belanja dan Investasi Pemerintah Dalam Pembentukan PDRB Provinsi Kalmantan Barat Triwulan I tahun 2020

Pendapatan Daerah Y (miliar)	34.624,52
Konsumsi Rumah Tangga C	N/A
Investasi (I) (miliar)	129,64
(Ekspor-Impor) M	N/A
Government Spending G (miliar)	3.571,66

Kontribusi belanja pemerintah terhadap pembentukan PDRB adalah sebesar 10,31 persen dan kontribusi investasi pemerintah adalah 0,37 persen. Pada Triwulan I 2020 kontribusi Pemerintah terhadap PDRB cukup berpengaruh ditengah merosotnya perekonomian. Dengan angka 10, 31 persen, belanja pemerintah dapat dikatakan sebagai salah satu pendorong perekonomian Provinsi Kalimantan Barat pada triwulan I 2020.

Pantai Tanjung Belandang, Ketapang

BAB V
BERITA/ ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

Perjalanan Panjang Penyaluran Dana Desa di Kalimantan Barat

Semangat percepatan penyaluran Dana Desa begitu terasa di awal tahun, keseriusan dalam Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa dibuktikan dengan terbitnya tata cara penyaluran Dana Desa melalui PMK No 205 Tahun 2019 pada Desember tahun lalu. Peraturan tersebut merupakan simplifikasi dari pengaturan Dana Desa pada PMK 50/PMK.07/2017, Dana Desa disalurkan langsung dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUDesa (Rekening Kas Umum Desa).

Untuk meningkatkan kualitas *output* Dana Desa, pengaturan mengenai skema termin pencairan Dana Desa juga diubah. Pada skema baru: Tahap I (40 pesen), Tahap II (40 persen), dan Tahap III (20 persen) Sedangkan pada skema lama: Tahap I (20 persen), Tahap II (40 persen), Tahap III (20 persen). Pada pengaturan baru desa Mandiri mendapat porsi lebih besar tiap tahapnya, karena hanya dibagi menjadi dua tahap, Tahap I (60 persen) dan Tahap II (40 persen).

Percepatan penyaluran Dana Desa tentunya perlu dibarengi dengan pengetahuan yang memadai oleh aparat di daerah. Kanwil DJPb Kalimantan Barat (Kalimantan Barat) mendorong hal tersebut dengan mengadakan Rakor Dana Desa, untuk mensosialiasikan peraturan yang baru, menghimpun permasalahan juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa.

Pada Triwulan I, Dana Desa di Kalimantan Barat sudah tersalur 194.33 Miliar pada 382 desa dari total 2031 desa di Kalimantan Barat. Meski demikian, penyaluran s.d Triwulan I Tahun 2020 menurun jauh sebesar 48,48 persen dari periode yang sama pada Tahun 2019, yaitu sebesar 377,20 miliar. Secara jelasnya, akan digambarkan pada tabel berikut:

Tabel V.1
Penyaluran Dana Desa per Bulan Tahun 2019 dan 2020

Tahun	Januari	Februari	Maret	Total
2020	-	35,41	158,92	194,33
2019	-	122,67	254,54	377,21

Sumber: OM SPAN diolah.

Februari Tahun 2020, permasalahan mengenai pemenuhan syarat APBDes maupun oleh Pemkab yang berupa Perbup Pembagian Dana Desa masih menjadi kendala dalam penyaluran Dana Desa. Kemudian, untuk penyaluran pada Bulan Maret menurun dikarenakan mulai terdampak dengan adanya Pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19).

Pandemi Covid-19 telah menciptakan ketidakpastian dan kegamangan. Kita tidak pernah menduga dan membayangkan dampak negatif Covid-19 yang begitu serius terhadap berbagai sendi kehidupan, terutama kesehatan dan ekonomi bahkan dinamika kehidupan sosial. Seiring dengan hal tersebut Pemerintah meresponnya dengan menerbitkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah akan melakukan berbagai penyesuaian anggaran dan menggesernya untuk penanganan wabah. Bersamaan dengan itu juga terbit Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Sebagai turunannya terbit PMK 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Pagu Dana Desa ditetapkan sebesar Rp71,19 T atau berkurang sebesar Rp0,81 T dari pagu sebelumnya. Meski demikian, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 mengamanatkan Dana Desa agar dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Covid-19. Wilayah Kalimantan Barat ditetapkan mendapatkan Dana Desa sebesar 2,02 T atau menurun sejumlah 0,22 T dari pagu sebelumnya.

Melalui PMK Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa diatur mekanisme Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT) Desa. BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Selain untuk BLT, Dana Desa juga diprioritaskan untuk digunakan dalam pembentukan relawan desa lawan Covid-19, penanganan Covid-19 dan kegiatan tanggap darurat bencana.

Besaran BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa yang diterima desa atau lebih dari 35% dengan persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota. Beberapa kemudahan telah diberikan untuk penyaluran BLT. Revisi Perkada mengenai Perhitungan dan Penetapan Rincian Dana Desa per Desa diberikan kelonggaran untuk disampaikan pada saat melakukan Penyaluran Dana Desa Tahap III. Kemudahan lainnya adalah adanya diskresi dari Kantor Pusat DJPb untuk sementara meniadakan RPD (Rencana Penarikan Dana) khusus untuk Dana Desa. RPD adalah perenncanaan kas yang sebelumnya wajib dilakukan untuk penyediaan kas dengan penarikan di atas 1 M. Dalam masa tanggap Covid-19 ini, RPD ditiadakan untuk Dana Desa agar bantuan kepada penduduk yang membutuhkan dapat segera disalurkan. Hingga tulisan ini dibuat di Kalimantan Barat telah tersalur BLT sebesar 404 juta pada 674 KPM.

Harapannya Dana Desa dapat benar-benar secara efektif dipergunakan dalam penanganan Covid-19. Selebihnya, kita perlu saling mendukung, menjaga semangat kerja sama, dan saling menguatkan agar terus bisa bertahan dan semakin tangguh menghadapi dampak Covid-19. Jarak fisik boleh renggang, tapi ikatan sosial dan solidaritas justru harus dipererat dan diperkuat.

DJPb
Indonesian Treasury

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan K.S. Tubun No. 36, Kota Pontianak, Kalimantan Barat